



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2023

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEGAL**

Alamat : Jalan Ahmad Yani No.51 Slawi Telp (0283) 4565170 Kode Pos 52412

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMANCOVER.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
KATA PENGANTAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok & Fungsi.....	1
1.3 Aspek Strategis & Permasalahan Utama.....	6
1.4 Landasan Hukum.....	7
1.5 Sistematika.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Startegis.....	9
2.2 Perencanaan Kinerja.....	10
2.3 Perjanjian Kinerja.....	11
BAB III AKUNTABILITAS KENIRJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	12
3.2 Analisis Capaian Kinerja.....	12
3.3 Realisasi Anggaran.....	20
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	21
B. Rekomendasi.....	21
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 : Tujuan dan Sasaran.....	10
Tabel 2.2 : Rencana Kinerja.....	10
Tabel 2.3 : Perjanjian Kinerja.....	11
Tabel 2.4 : Program dan Kegiatan.....	11
Tabel 3.1 : Skala Nilai Peringkat Kerja.....	12

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Tegal..... 2

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Tegal, bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentangtingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Strategis 2019-2024 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Slawi, 20 Februari 2024

Kepala Dinas PMPTSP

Kabupaten Tegal



DESSY ARIFANTO, S.Sos., MT

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 197212161997031004

BAB I

PENDAHULUAN

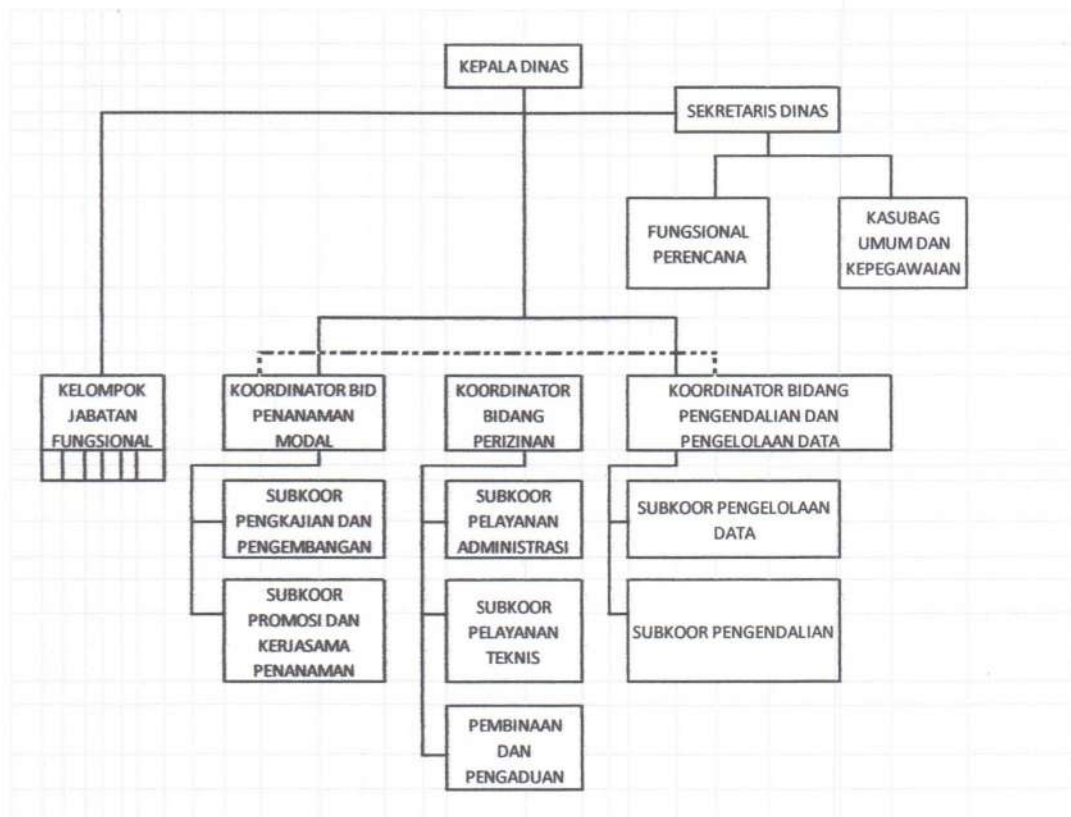
1.1 Latar Belakang

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2023, pemerintah daerah menyusun LKjIP 2023 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategi instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP) Kabupaten Tegal merupakan lembaga lainnya yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok & Fungsi

Susunan Organisasi DPMPTSP sesuai Peraturan Bupati Tegal Nomor 104 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :



1. Kepala
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a) Fungsional Perencana;
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Terdiri dari;
 - a) Bidang Penanaman Modal, terdiri dari dua sub koordinator yaitu:
 1. Sub koordinator Pengkajian dan Pengembangan;
 2. Sub koordinator Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.
 - b) Bidang Perizinan terdiri dari dua seksi yaitu:
 1. Sub koordinator Pelayanan Administrasi;
 2. Sub koordinator Pelayanan Teknis;
 3. Sub koordinator Pembinaan dan Pengaduan.
 - c) Bidang Pengendalian dan pengelolaan data, terdiri dari dua sub koordinator, yaitu :
 1. Sub koordinator Pengelolaan Data;
 2. Sub koordinator Pengendalian.

1.2.1 Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas

otonomi dan tugas pembantuan urusan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal mempunyai fungsi:

- a. Penetapan rencana kerja;
- b. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- c. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- d. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- e. Pengelolaan dan fasilitasi program dan kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- g. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- h. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

1.2.2 Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan umum dan teknis kesekretariatan / ketatausahaan;

- b. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan Dinas;
- c. Pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Dinas bidang penanaman modal dan PTSP, serta pengendalian;
- d. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas;
- e. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dinas;
- f. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi penyelenggaraan tugas Dinas;
- g. Pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
- h. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan;
- i. Penyiapan system informasi manajemen terintegrasi.

1.2.3 Koordinator Bidang Penanaman Modal

Koordinator Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal dalam penyelenggaraan urusan/bidang pengkajian dan pengembangan, promosi dan kerjasama bidang Penanaman Modal.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Koordinator Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal;
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang Penanaman Modal;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi program di bidang Penanaman Modal;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program di bidang Penanaman Modal;
- f. Pelaksanaan administrasi di bidang Penanaman Modal;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang Penanaman Modal.

1.2.4 Koordinator Bidang Perizinan

Koordinator Bidang Perizinan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal dalam melaksanakan rencana kerja, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian kebijakan teknis urusan/bidang pelayanan perizinan dan non perizinan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Koordinator Bidang Perizinan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. Pengekoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi program di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
- f. Pelaksanaan administrasi dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
- h. Pengekoordinasian dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan mal pelayanan public pelayanan perizinan dan non perizinan;
- i. Menyelenggarakan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lain di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan serta pengaduan;
- j. Pembinaan, pengaturan, pengendalian, konsultasi dan fasilitasi pelaksanaan penanganan pengaduan pelayanan perizinan dan non perizinan.

1.2.5 Koordinator Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Data

Koordinator Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Data mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan/bidang Pengendalian dan Pengelolaan Data.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Koordinator Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Data mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di Pengendalian dan Pengelolaan Data;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian dan Pengelolaan Data;
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang Pengendalian dan Pengelolaan Data;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi program di bidang Pengendalian dan Pengelolaan Data;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program di bidang Pengendalian dan Pengelolaan Data;
- f. Pelaksanaan administrasi dibidang Pengendalian dan Pengelolaan Data;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang Pengendalian dan Pengelolaan Data.

1.3 Aspek Strategis & Permasalahan Utama

Potensi permasalahan pembangunan pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan , dan ancaman yang tidak diantisipasi. Tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karenadampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Identifikasi terhadap permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis yang muncul, selanjutnya dapat dijadikan dasar dalam menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan.

Pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal dapat dilihat dalam tabel berikut :

No	Masalah pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih rendahnya Investor PMA dan PMDN	Belum meningkatnya Jumlah Investor PMA dan PMDN	Kurangnya kajian profil investasi Kurangnya persentasi dan peluang investasi serta kurangnya upaya promosi investasi kerjasama Perusahaan
		Belum optimalnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Kurang optimalnya pelayanan perizinan teknis Kurang optimalnya pelayanan perizinan secara administrasi Masih adanya pengaduan atas pelayanan
		Belum maksimalnya Kepatuhan Perusahaan	Kurang tersortirnya pelaku usaha yang telah dilakukan monitoring kepengurusan perizinan dan laporan LKPM Pengelolaan Data yang belum maksimal

1.4 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Permenpan No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Bupati Tegal Nomor 104 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

1.5 Sistematika

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Kedudukan, Tugas Pokok & Fungsi
- 1.3 Aspek Strategis & Permasalahan Utama
- 1.4 Landasan Hukum
- 1.5 Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Indikator Kinerja
- 2.3 Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Analisis Capaian Kinerja
- 3.3 Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Rekomendasi

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Memuat penjelasan singkat mengenai Rencana Strategis yang terdiri dari:

1. Visi

Visi yang dimaksud adalah "Terwujudnya masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia".

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi di atas, dirumuskan pula beberapa misi yang hendak dijalankan selama lima tahun kedepan beserta peran yang dapat dilaksanakan bidang penanaman modal. Adapun Misi Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2019-2024 adalah :

- a. Mewujudkan Pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel, dan efektif dalam melayani rakyat;
- b. Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang handal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan;
- c. Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan;
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.

Berdasarkan analisa terhadap Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2019-2024 dapat ditentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal. Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Dinas PMPTSP Kabupaten Tegal dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Tegal antara lain :

- a. Adanya Sosialisasi pembuatan Laporan Kegiatan Penanaman Modal;
- b. Perencanaan pembangunan sarana prasarana wilayah yang membaik;
- c. Pemanfaatan aplikasi Online Single Submission (OSS) sudah diterapkan untuk proses pelayanan perizinan;
- d. Perintisan penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu yang memudahkan calon-calon penanam modal mendapatkan izin berusaha;
- e. Adanya Regulasi yang telah disesuaikan;

- f. Adanya Monitoring dan evaluasi pengendalian keperusahaan-perusahaan;
- g. Tersedianya Data dan informasi.

3. Tujuan & Sasaran

Tabel 2.1 Sasaran dan Tujuan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Survei Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Perizinan	Nilai IKM	78%	79 %	80 %	81 %	82 %
2	Nilai Minat Investasi PMA dan PMDN	Meningkatnya Jumlah Investor	Nilai Minat Investasi PMA	-	-	Rp 980 Miliar	Rp 1,029 Triliun	Rp 1,080 Triliun
			Nilai Minat Investasi PMDN	-	-	Rp 1,450 Triliun	Rp 1,522 Triliun	Rp 1,598 Triliun
3	Kepatuhan Perusahaan	Meningkatnya Kepatuhan Perusahaan	Prosentase Kepatuhan Perusahaan	61,28 %	64,28 %	67,28 %	70,28 %	73,28 %
4	Layanan Kesekretariatan	Meningkatnya Layanan Kesekretariatan	Prosentase Layanan Kesekretariatan	93%	94%	95%	96%	97%

2.2 Perencanaan Kinerja

Menjabarkan dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam renstra.

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET (2023)
1	Survei Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Perizinan	Nilai IKM	%	81
2	Nilai Minat Investasi PMA dan PMDN	Meningkatnya Jumlah Investor	Nilai Minat Investasi PMA	Rupiah	1,029 Triliun
			Nilai Minat Investasi PMDN	Rupiah	1,522 Triliun
3	Kepatuhan Perusahaan	Meningkatnya Kepatuhan Perusahaan	Prosentase Kepatuhan Perusahaan	%	70,28
4	Layanan Kesekretariatan	Meningkatnya Layanan Kesekretariatan	Prosentase Layanan Kesekretariatan	%	96

Tabel 2.2 Rencana Kinerja

2.3 Perjanjian Kinerja

Menyajikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Perizinan	Nilai IKM	%	81
2	Meningkatnya Jumlah Investor	Nilai Minat Investasi PMA	Rupiah	1,029 Triliun
		Nilai Minat Investasi PMDN	Rupiah	1,522 Triliun
3	Meningkatnya Kepatuhan Perusahaan	Prosentase Kepatuhan Perusahaan	%	70,28
4	Meningkatnya Layanan Kesekretariatan	Prosentase Layanan Kesekretariatan	%	96

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Layanan Kesekretariatan	100 %	4.746.822.000
2	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Prosentase Lokasi Potensi yang Memiliki Profil Investasi	57,14 %	110.000.000
3	Promosi Penanaman Modal	Prosentase Peningkatan Calon Investor yang Berkomitmen	40 %	200.000.000
4	Pelayanan Penanaman Modal	Prosentase Ketepatan Waktu yang Ditetapkan Sebelum Batas Waktu	100 %	120.000.000
5	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Prosentase Kepatuhan Perusahaan	70,28 %	393.900.000
6	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Prosentase Data Layanan yang Termanfaatkan	11,46 %	20.000.000

Tabel 2.4 Program dan Kegiatan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi skala nilai dan kriteria penilaian untuk kinerja organisasi yang dilaporkan dalam bentuk *Outcomes*.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja.

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Skala Capaian Kinerja	Kategori Penilaian
91% ≤ 100%	Sangat tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- (1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja;
- (2) Hasil Sedang Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal;
- (3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pada sub bab ini disajikan kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini (contoh tabel/ disesuaikan dengan PK Kepala PD);

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya Pelayanan Perizinan	Nilai IKM	81%	90,75%	113,6%	Sangat Tinggi	Laporan IKM yang secara periodik dilaporkan ke Kemenpan RB
2	Meningkatnya Jumlah Investor	Nilai Minat Investasi PMA	Rp 1,029 Triliun	Rp 1,196 Triliun	116,2%	Sangat Tinggi	Laporan Data Realisasi Penanaman Modal (BKPM)
		Nilai Minat Investasi PMDN	Rp 1,522 Triliun	Rp 1,122 Triliun	73,71%	Sedang	
3	Meningkatnya Kepatuhan Perusahaan	Prosentase Kepatuhan Perusahaan	70,28%	95,4%	135,74%	Sangat Tinggi	
4	Meningkatnya Layanan Keseekretariatan	Prosentase Layanan Keseekretariatan	96%	96%	100%	Sangat Tinggi	Realisasi Fisik Berdasarkan Tahun Anggaran Berjalan

Capaian kinerja tujuan mewujudkan peningkatan pelayanan perizinan didukung oleh 1 (satu) indikator dengan capaian sebesar 113,6% atau dengan kategori Sangat Tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dinas PMPTSP telah berusaha untuk memberikan pelayanan perizinan yang baik kepada Masyarakat.

Capaian kinerja tujuan mewujudkan peningkatan jumlah investor didukung oleh 2 (dua) indikator dengan capaian sebesar 116,2% atau dengan kategori Sangat Tinggi untuk indikator Nilai Minat Investasi PMA, dan capaian sebesar 73,71% atau dengan kategori Sedang untuk indikator Nilai Minat Ivestasi PMDN. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dinas PMPTSP telah berupaya untuk menarik minat para investor PMA dan PMDN, terkhusus pada investor PMA.

Capaian kinerja tujuan mewujudkan peningkatan kepatuhan perusahaan didukung oleh 1 (satu) indikator dengan capaian sebesar 135,74% atau dengan kategori Sangat Tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dinas PMPTSP telah secara aktif memonitoring para pelaku usaha yang ada pada Kabupaten Tegal untuk selalu melaporkan Perusahaan mereka pada BKPM.

Capaian kinerja tujuan mewujudkan peningkatan layanan keseekretariatan didukung oleh 1 (satu) indikator dengan capaian sebesar 100% atau dengan kategori Sangat Tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dinas PMPTSP telah memberikan layanan keseekretariatan yang baik dalam memenuhi semua kegiatan yang ada.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (minimal 3 tahun);

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya Pelayanan Perizinan	Nilai IKM	79 %	88,86 %	112,4 %	80 %	89,77 %	112,2 %	81 %	90,75 %	112,03 %
2	Meningkatnya Jumlah Investor	Nilai Minat Investasi PMA	-	-	-	Rp 980 Miliar	Rp 611,3 Miliar	62,38 %	Rp 1,029 Triliun	Rp 1,196 Triliun	116,2 %
		Nilai Minat Investasi PMDN	-	-	-	Rp 1,450 Triliun	Rp 800 Juta	0,05 %	Rp 1,522 Triliun	Rp 1,122 Triliun	73,71 %
3	Meningkatnya Kepatuhan Perusahaan	Prosentase Kepatuhan Perusahaan	64,28 %	65 %	101,1 %	67,28 %	68,34 %	101,5 %	70,28 %	90,4 %	128,6 %
4	Meningkatnya Layanan Kesekretariatan	Prosentase Layanan Kesekretariatan	94%	94%	100%	95%	95%	100%	96%	96%	100%

*Mulai tahun 2022, Indikator Kinerja Laju Nilai Investasi PMA/PMDN berubah menjadi Jumlah Nilai Minat Investasi PMA/PMDN

Realisasi capaian Nilai IKM dari tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2023 secara presentasi capaian mengalami peningkatan setiap tahunnya dan telah melampaui target yang telah ditetapkan.

Realisasi capaian Nilai Minat Investasi PMA tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2023 secara presentasi capaian mengalami peningkatan dan telah melampaui target yang ditetapkan, sedangkan untuk realisasi capaian Nilai Minat Investasi PMDN tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2023 secara presentasi capaian mengalami peningkatan tetapi belum melampaui target yang telah ditetapkan.

Realisasi capaian Kepatuhan Perusahaan dari tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2023 secara presentasi capaian mengalami peningkatan setiap tahunnya dan telah melampaui target yang telah ditetapkan.

Realisasi capaian Layanan Kesekretariatan dari tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2023 presentasi capaian mengalami peningkatan dan telah melampaui target yang telah ditetapkan.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target Akhir 2024	% Capaian	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Pelayanan Perizinan	Nilai IKM	90,75 %	82 %	110,6 %	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Jumlah Investor	Nilai Minat Investasi PMA	Rp 1,196 Triliun	Rp 1,080 Triliun	110,7 %	Sangat Tinggi
		Nilai Minat Investasi PMDN	Rp 1,122 Triliun	Rp 1,598 Triliun	70,21 %	Sedang
3	Meningkatnya Kepatuhan Perusahaan	Prosentase Kepatuhan Perusahaan	90,4 %	73,28 %	123,3 %	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya Layanan Kesekretariatan	Prosentase Layanan Kesekretariatan	96 %	97 %	98,96%	Sangat Tinggi

Capaian realisasi Nilai IKM pada tahun 2023 sebesar 90,75% telah melampaui target realisasi pada RPJMD Tahun 2024 sebesar 82%. Capaian tahun 2023 ini sudah 110,6% dari target akhir RPJMD, diharapkan setelah berakhirnya RPJMD 2019-2024 target Nilai IKM tetap melampaui target dan cenderung mengalami peningkatan dari realisasi tahun sebelumnya.

Capaian realisasi Nilai Minat Ivestasi PMA pada tahun 2023 sebesar Rp 1,196 Triliun telah melampaui target realisasi pada RPJMD Tahun 2024 sebesar Rp 1,080 Triliun. Capaian tahun 2023 ini sudah 110,7% dari target akhir RPJMD, diharapkan setelah berakhirnya RPJMD 2019-2024 target Nilai Minat Investasi PMA tetap stabil melampaui target dan cenderung mengalami peningkatan dari realisasi tahun sebelumnya. Sedangkan untuk Capaian realisasi Nilai Minat Ivestasi PMDN pada tahun 2023 sebesar Rp 1,122 Triliun belum melampaui target realisasi pada RPJMD Tahun 2024 sebesar Rp 1,598 Triliun. Capaian tahun 2023 ini sudah 70,21% dari target akhir RPJMD, diharapkan setelah berakhirnya RPJMD 2019-2024 target Nilai Minat Investasi PMDN dapat tercapai.

Capaian realisasi Kepatuhan Perusahaan pada tahun 2023 sebesar 90,4% telah melampaui target realisasi pada RPJMD Tahun 2024 sebesar 73,28%. Capaian tahun 2023 ini sudah 123,3% dari target akhir RPJMD, diharapkan setelah berakhirnya RPJMD 2019-2024 target Kepatuhan Perusahaan tetap stabil melampaui target dan cenderung mengalami peningkatan dari realisasi tahun sebelumnya.

Capaian realisasi Kepatuhan Perusahaan pada tahun 2023 sebesar 96% telah melampaui target realisasi pada RPJMD Tahun 2024 sebesar 97%. Capaian tahun 2023 ini sudah 98,96% dari target akhir RPJMD, diharapkan setelah berakhirnya RPJMD 2019-2024 target Kepatuhan Perusahaan dapat tercapai.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya Pelayanan Perizinan	Nilai IKM	81 %	90,75 %	112,03 %	Semakin mudahnya proses layanan perizinan yang dilakukan melalui sistem <i>online</i>	Tetap menjaga ketepatan/batasan waktu seefektif mungkin dalam kepengurusan layanan perizinan sehingga masyarakat tidak merasakan keterlambatan terhadap pelayanan yang diberikan
2	Meningkatnya Jumlah Investor	Nilai Minat Investasi PMA	Rp 1,029 Triliun	Rp 1,196 Triliun	116,2 %	Ikut aktif dalam mengikuti kegiatan pameran berskala nasional yang diikuti oleh para calon investor asing	Secara aktif melakukan pendekatan persuasif kepada para calon investor yang datang, melakukan penjelasan keunggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Tegal
		Nilai Minat Investasi PMDN	Rp 1,522 Triliun	Rp 1,122 Triliun	73,71 %	Kurangnya melakukan kegiatan yang berorientasi khusus terhadap para investor PMDN	Mengadakan Investasi Business Forum yang difokuskan kepada para investor PMDN yang seharusnya didukung pula oleh anggaran yang memadai.

3	Meningkatnya Kepatuhan Perusahaan	Prosentase Kepatuhan Perusahaan	70,28 %	90,4 %	128,6 %	Aktif melakukan monitoring para pelaku usaha yang ada di Lingkungan Kabupaten Tegal	Melakukan penyortiran para pelaku usaha yang benar-benar belum dilakukan monitoring pelaku usaha, sehingga tidak terjadi rangkap pada pelaku usaha yang telah dilakukan monitoring
4	Meningkatnya Layanan Kesekretariatan	Prosentase Layanan Kesekretariatan	96%	96%	100%	Merealisasikan kebutuhan yang dibutuhkan pada Sekretariat	Mempertahankan layanan kesekretariatan

(bila ada misal yang lebih dari 100% ataupun kurang dari 70% capaiannya)

Realisasi capaian Nilai IKM pada tahun 2023 mencapai 112,03% dari target, yang dapat digambarkan sebagai suatu keberhasilan dalam Tingkat pelayanan perizinan yang diberikan kepada Masyarakat.

Realisasi capaian Nilai Minat Investasi PMA pada tahun 2023 mencapai 116,2% dari target, yang dapat digambarkan sebagai suatu keberhasilan dalam menarik minat investasi para investor asing. Sedangkan realisasi capaian Nilai Minat Investasi PMDN pada tahun 2023 mencapai 73,71% dari target, yang dapat digambarkan sebagai suatu kegagalan dalam menarik minat investasi para investor dalam negeri.

Realisasi capaian kepatuhan perusahaan pada tahun 2023 mencapai 128,6% dari target, yang dapat digambarkan sebagai suatu keberhasilan dalam Tingkat kepatuhan para pelaku usaha dalam menyampaikan pelaporan penanaman modal pada BKPM.

Realisasi capaian layanan kesekretariatan pada tahun 2023 mencapai 100% dari target, yang dapat digambarkan sebagai suatu keberhasilan dalam tingkat layanan terhadap berjalannya kegiatan yang ada pada sekretariat.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 Memuat analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah

NO	Tujuan / Sasaran	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	Meningkatnya Pelayanan Perizinan	81 %	90,75 %	112,03 %	Rp 120.000.000	Rp 118.063.147	98,39 %	Sangat Efisiensi
2	Meningkatnya Jumlah Investor	Rp 1,029 Triliun	Rp 1,196 Triliun	116,2 %	Rp 200.000.000	Rp 193.810.259	96,91 %	Sangat Efisiensi
		Rp 1,522 Triliun	Rp 1,122 Triliun	73,71 %				
3	Meningkatnya Kepatuhan Perusahaan	70,28 %	90,4 %	128,6 %	Rp 393.900.000	Rp 364.761.255	92,60 %	Sangat Efisiensi
4	Meningkatnya Layanan Kesekretariatan	96 %	96 %	100 %	Rp 4.746.822.000	Rp 4.345.417.311	91,54 %	Sangat Efisiensi

Realisasi capaian Nilai IKM pada tahun 2023 jika dikaitkan dengan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 98,39% dapat dikatakan sangat efisien.

Realisasi capaian Nilai Minat Investasi PMA pada tahun 2023 jika dikaitkan dengan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 96,91% dapat dikatakan sangat efisien. Walaupun jika digambarkan secara lebih detail, dapat dilihat pada capaian realisasi nilai minat investasi PMDN masih kurang dibandingkan dengan realisasi nilai minta investasi PMA, dikarenakan pada kenyataannya anggaran yang ada belum mampu mencakup lebih banyak kegiatan yang difokuskan kepada para investor PMDN, seperti mengadakan kegiatan Slawi Investment Business Forum.

Realisasi capaian kepatuhan perusahaan pada tahun 2023 jika dikaitkan dengan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 92,60% dapat dikatakan sangat efisien. Dalam hal ini, terdapat anggaran DAK Non Fisik yang bisa mendukung kegiatan untuk melakukan monitoring kepada para pelaku usaha sehingga target yang ada dapat tercapai dengan baik.

Realisasi capaian layanan kesekretariatan pada tahun 2023 jika dikaitkan dengan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 91,54% dapat dikatakan sangat efisien. Walaupun jika dibandingkan dengan realisasi capaian indicator kerja lainnya, capaian layanan kesekretariatan memiliki capaian yang paling kecil, dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat terlaksana, seperti dibatalkannya kegiatan Grand Launching Mal Pelayanan Publik dan sebagai ganti kegiatan tersebut dilaksanakan secara serentak oleh beberapa kota/kabupaten di Kementerian Pan-RB.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1	Meningkatnya Pelayanan Perizinan	Nilai IKM	112,03 %	Pelayanan Penanaman Modal	Nilai IKM	112,03 %	Sangat Menunjang
2	Meningkatnya Jumlah Investor	Nilai Minat Investasi PMA	116,2 %	Promosi Penanaman Modal	Nilai Minat Investasi PMA	116,2 %	Sangat Menunjang
		Nilai Minat Investasi PMDN	73,71 %		Nilai Minat Investasi PMDN	73,71 %	Cukup Menunjang
3	Meningkatnya Kepatuhan Perusahaan	Prosentase Kepatuhan Perusahaan	128,6 %	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Prosentase Kepatuhan Perusahaan	128,6 %	Sangat Menunjang
4	Meningkatnya Layanan Kesekretariatan	Prosentase Layanan Kesekretariatan	100 %	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Layanan Kesekretariatan	100 %	Sangat Menunjang

Realisasi capaian Nilai IKM pada tahun 2023 mencapai 112,03% dapat dikatakan sangat menunjang program/kegiatan yang terkait yaitu Program Pelayanan Penanaman Modal.

Realisasi capaian Nilai Minat Investasi PMA pada tahun 2023 mencapai 116,2% dapat dikatakan sangat menunjang, sedangkan Realisasi capaian Nilai Minat Investasi PMDN pada tahun 2023 mencapai 73,71% dapat dikatakan cukup menunjang dalam program/kegiatan yang terkait yaitu Program Promosi Penanaman Modal.

Realisasi capaian kepatuhan perusahaan pada tahun 2023 mencapai 128,6% dapat dikatakan sangat menunjang program/kegiatan yang terkait yaitu Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Realisasi capaian layanan kesekretariatan pada tahun 2023 mencapai 100% dapat dikatakan sangat menunjang program/kegiatan yang terkait yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

3.3 REALISASI ANGGARAN

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja

NO	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.746.822.000	4.345.417.311	91,54 %
2	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	110.000.000	109.115.816	99,20 %
3	Promosi Penanaman Modal	200.000.000	193.810.259	96,91 %
4	Pelayanan Penanaman Modal	120.000.000	118.063.147	98,39 %
5	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	393.900.000	364.761.255	92,60 %
6	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	20.000.000	18.906.400	94,53 %

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Tujuan dan sasaran sudah tercapai dengan sangat baik, meskipun begitu, beberapa aspek indikator kinerja masih harus ditingkatkan kembali. Seperti halnya dalam hal jumlah investor pada Kabupaten Tegal masih sangat berpotensi untuk dapat dieksplor lebih luas sehingga dapat menarik minat para calon investor, salah satu yaitu melaksanakan kegiatan Investment Business Forum yang berfokus pada para investor PMDN yang realisasi pada tahun 2023 masih belum mencapai target sehingga target pada Tahun 2024 dapat melebihi target yang telah ditetapkan.

B. REKOMENDASI

1. Ikut aktif berpartisipasi dalam pameran atau kegiatan bertaraf regional maupun nasional yang dapat menarik minat para calon investor;
2. Aktif melakukan sosialisasi kepada para calon investor mengenai mudahnya melakukan investasi di Kabupaten Tegal;
3. Membuat daftar pelaku usaha yang belum dilakukan kegiatan monitoring, sehingga tidak terjadi monitoring berulang terhadap pelaku usaha yang telah mendapatkan perlakuan monitoring;
4. Menjaga tingkat pelayanan perizinan, sehingga para pemohon merasa terbantu dan puas dengan pelayanan perizinan yang diberikan.